

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Alasan Pemilihan Judul

Menurut data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 31 negara di dunia saat ini tengah menghadapi kelangkaan dan krisis air bersih pada level yang mengkhawatirkan. Satu miliar lebih orang di seluruh dunia tidak memiliki akses pada air minum bersih dan lebih dari tiga miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi.<sup>1</sup>

Sementara itu, menurut riset yang dilakukan Joel E. Cohen, pada tahun 2025 penduduk bumi akan bertambah sebanyak 2,6 miliar dari jumlah hari ini. Bahkan, berdasarkan asumsi dan perhitungannya, penduduk bumi pada tahun 2050 akan mencapai jumlah 12,5 miliar orang.<sup>2</sup> Merujuk pada data perkiraan pertumbuhan penduduk ini, Maude Barlow dan Tony Clarke (2002) memperkirakan sepertiga dari jumlah ini akan hidup dalam kondisi kekurangan air yang serius, dan sepertiganya akan hidup dengan kelangkaan air absolut. Permintaan akan air akan melebihi ketersediaannya sebanyak 56%.

Hal tersebut di atas diperparah oleh peran korporasi-korporasi besar yang merupakan kaki tangan ekonomi neoliberalisme yang terus-menerus melakukan privatisasi atas sumber daya air hampir di seluruh dunia. Melalui

---

<sup>1</sup> Lihat Maude Barlow dan Tony Clarke, *Blue Gold: Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air*, Jakarta, Gramedia, 2008. Hlm. 28.

<sup>2</sup> Lihat Joel E. Cohen, *Pertumbuhan Populasi dan Daya Dukung Bumi*, dalam Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, dan Barbara Smith-Moran. *Bumi yang Terdesak: Perspektif Ilmiah*

Dengan demikian, tentu saja, riset mengenai “politik air” dalam hubungannya dengan jejaring neoliberalisme sangat menarik sebab dapat membukakan potensi konflik antara tiga ranah penting yang menjadi objek kajian Ilmu Hubungan Internasional yakni, masyarakat sipil (*civil society*), pemerintah (*government*), dan sektor swasta (*private sector*).

Hal inilah yang melatarbelakangi saya untuk menulis skripsi dengan judul **“Politik Air dalam Jerat Neoliberalisme: Tinjauan Kritis Atas Konflik Air di Negara Berkembang”**.

Secara umum, skripsi ini akan menyinggung persoalan krisis air global dengan berbagai hal yang melingkupinya—termasuk persoalan-persoalan ekologi global. Secara khusus dan mendalam, skripsi ini akan memperlihatkan bagaimana neoliberalisme bekerja dalam sektor air dan menciptakan peluang konflik langsung antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Penelitian skripsi ini akan memokuskan perhatian pada privatisasi sumber air yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, dan bagaimana “efek konflik” yang ditimbulkannya.

Di samping itu, penelitian mengenai hal ini sebelumnya belum pernah dilakukan, terutama penelitian yang berusaha memotret dan menjelaskan proses hegemoni yang dilakukan neoliberalisme terhadap sumber daya air di negara-negara berkembang.

Pemilihan judul penelitian ini juga didukung oleh ketersediaan data yang mendukung proses penelitian yang akan dilakukan. Data-data tersebut

Dengan demikian, tentu saja, riset mengenai “politik air” dalam hubungannya dengan jejaring neoliberalisme sangat menarik sebab dapat membukakan potensi konflik antara tiga ranah penting yang menjadi objek kajian Ilmu Hubungan Internasional yakni, masyarakat sipil (*civil society*), pemerintah (*government*), dan sektor swasta (*private sector*).

Hal inilah yang melatarbelakangi saya untuk menulis skripsi dengan judul **“Politik Air dalam Jerat Neoliberalisme: Tinjauan Kritis Atas Konflik Air di Negara Berkembang”**.

Secara umum, skripsi ini akan menyinggung persoalan krisis air global dengan berbagai hal yang melingkupinya—termasuk persoalan-persoalan ekologi global. Secara khusus dan mendalam, skripsi ini akan memperlihatkan bagaimana neoliberalisme bekerja dalam sektor air dan menciptakan peluang konflik langsung antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Penelitian skripsi ini akan memokuskan perhatian pada privatisasi sumber air yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, dan bagaimana “efek konflik” yang ditimbulkannya.

Di samping itu, penelitian mengenai hal ini sebelumnya belum pernah dilakukan, terutama penelitian yang berusaha memotret dan menjelaskan proses hegemoni yang dilakukan neoliberalisme terhadap sumber daya air di negara-negara berkembang.

Pemilihan judul penelitian ini juga didukung oleh ketersediaan data yang mendukung proses penelitian yang akan dilakukan. Data-data tersebut

penduduk dunia tidak bisa mengakses air bersih dan sebanyak 2,6 miliar penduduk bumi tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Tak hanya sampai di situ, fakta yang lebih mengejutkan menunjukkan bahwa, setiap lima belas detik, anak-anak yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia harus meninggal akibat persoalan air—mulai dari kekurangan air bersih sampai pada penyakit yang ditimbulkan dari konsumsi air yang terkontaminasi zat-zat berbahaya.

Berdasarkan sejumlah fakta di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan awal bahwa saat ini krisis air global tengah menjadi masalah serius yang semestinya menjadi sorotan publik internasional. Krisis air hebat yang melanda China, India, Pakistan, Kanada, Israel, Australia, dan sebagian besar negara Timur Tengah dan Amerika Latin kini memasuki babak yang paling mengkhawatirkan.

China, misalnya, dalam penelitian yang dilakukan Bank Dunia (*World Bank*), krisis air China adalah salah satu dari yang terburuk. Dengan jumlah populasi yang mencapai 20 persen penduduk dunia, China hanya memiliki tujuh persen dari sumber air dunia. Volume air per kapita China juga hanya mencapai satu per empat (25%) dari kebutuhan rata-ratanya. Belum lagi jika melihat 90% saluran air bawah tanah (*cities groundwater*), sungai dan danau yang berada di China sudah terpolusi zat kimia berbahaya. Maka, tidak heran jika 160 juta orang yang tersebar di 665 kota di seluruh China terjangkit penyakit yang disebabkan oleh kekurangan air bersih (*lack of clean water*) dan

penduduk dunia tidak bisa mengakses air bersih dan sebanyak 2,6 miliar penduduk bumi tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Tak hanya sampai di situ, fakta yang lebih mengejutkan menunjukkan bahwa, setiap lima belas detik, anak-anak yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia harus meninggal akibat persoalan air—mulai dari kekurangan air bersih sampai pada penyakit yang ditimbulkan dari konsumsi air yang terkontaminasi zat-zat berbahaya.

Berdasarkan sejumlah fakta di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan awal bahwa saat ini krisis air global tengah menjadi masalah serius yang semestinya menjadi sorotan publik internasional. Krisis air hebat yang melanda China, India, Pakistan, Kanada, Israel, Australia, dan sebagian besar negara Timur Tengah dan Amerika Latin kini memasuki babak yang paling mengkhawatirkan.

China, misalnya, dalam penelitian yang dilakukan Bank Dunia (*World Bank*), krisis air China adalah salah satu dari yang terburuk. Dengan jumlah populasi yang mencapai 20 persen penduduk dunia, China hanya memiliki tujuh persen dari sumber air dunia. Volume air per kapita China juga hanya mencapai satu per empat (25%) dari kebutuhan rata-ratanya. Belum lagi jika melihat 90% saluran air bawah tanah (*cities groundwater*), sungai dan danau yang berada di China sudah terpolusi zat kimia berbahaya. Maka, tidak heran jika 160 juta orang yang tersebar di 665 kota di seluruh China terjangkit penyakit yang disebabkan oleh kekurangan air bersih (*Lack of clean water*) dan

krisis cadangan energi dan air, adalah sederet persoalan global yang mengancam terjadinya *global chaos* yang berpotensi pada perang besar perebutan sumber daya alam untuk saling bertahan hidup. Maka, tidak berlebihan kiranya jika Ismail Sarageldin, wakil presiden Bank Dunia, pernah menyatakan bahwa, "*Jika perang di abad ini banyak diakibatkan oleh sengketa minyak, perang di masa depan akan dipicu oleh air.*"

Saat ini, misalnya, Pakistan dan India saling berseteru atas kontrol strategis sungai Indu. Juga India dan China yang berkonflik karena air; China dianggap mengalihkan aliran air dari Himalaya ke China yang semestinya mengalir ke sungai Brahmaputera di India. Bila hal ini terus-menerus dibiarkan, pertikaian atas air di Asia dapat saja meletus.<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam hasil penelitian Bank Dunia yang dilakukan Nikolaus Stern pada tahun 2002, suhu bumi yang meningkat sampai 4 derajat celcius akan menyebabkan lebih dari 200 juta manusia harus mengungsi dari tempat tinggal dan komunitasnya pada tahun 2050 karena kekurangan air. Misalnya, bila permukaan air laut naik sampai 45 cm, maka 5,5 juta manusia penghuni delta Gangga harus pergi meninggalkan tempatnya untuk menemukan tempat yang baru.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Shindunata, "Bumi Makin Panas," dalam majalah dwibulanan *Basis*, Mei-Juni 2007.

<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian The "Costs of Climate Change" Report, tahun 2002.

krisis cadangan energi dan air, adalah sederet persoalan global yang mengancam terjadinya *global chaos* yang berpotensi pada perang besar perebutan sumber daya alam untuk saling bertahan hidup. Maka, tidak berlebihan kiranya jika Ismail Sarageldin, wakil presiden Bank Dunia, pernah menyatakan bahwa, "*Jika perang di abad ini banyak diakibatkan oleh sengketa minyak, perang di masa depan akan dipicu oleh air.*"

Saat ini, misalnya, Pakistan dan India saling berseteru atas kontrol strategis sungai Indu. Juga India dan China yang berkonflik karena air; China dianggap mengalihkan aliran air dari Himalaya ke China yang semestinya mengalir ke sungai Brahmaputera di India. Bila hal ini terus-menerus dibiarkan, pertikaian atas air di Asia dapat saja meletus.<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam hasil penelitian Bank Dunia yang dilakukan Nikolaus Stern pada tahun 2002, suhu bumi yang meningkat sampai 4 derajat celcius akan menyebabkan lebih dari 200 juta manusia harus mengungsi dari tempat tinggal dan komunitasnya pada tahun 2050 karena kekurangan air. Misalnya, bila permukaan air laut naik sampai 45 cm, maka 5,5 juta manusia penghuni delta Gangga harus pergi meninggalkan tempatnya untuk menemukan tempat yang baru.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Shindunata, "Bumi Makin Panas," dalam majalah dwibulanan *Basis*, Mei-Juni 2007.

<sup>7</sup> *World Bank, "The World's Water: A Guide to the Global Water Crisis," 2002.*

Melihat fakta-fakta empiris di atas dengan seluruh potensi terbukanya konflik baru atas perebutan sumber air, maka tidak heran kiranya jika ilmuwan HI terkemuka Dr. Peter Gleick menuliskan kekhawatirannya dalam bukunya *Fresh Water and Foreign Policy*, sebagai berikut:

“Just as states have fought over oil, water has played a role in international conflicts. Water resources have been military and political goals. Water resources have been used as weapons of war. Water systems and infrastructure, such as dams and supply canals, have been targets of war. And inequities in the distribution, use and consequences of water management and use have been a source of tension and dispute.”<sup>9</sup>

Meskipun demikian, krisis air global yang terjadi saat ini belum sepenuhnya disadari negara-negara di seluruh dunia dengan cukup baik, terlebih negara-negara berkembang, sehingga manajemen dan pengelolaan distribusi air bersih di negara-negara tersebut seringkali tidak cukup baik dan tidak merata. Di samping itu, penguasaan sumber-sumber air strategis oleh masyarakat sipil (*civil society*) tertentu atau sektor swasta (*private sector*) tertentu tanpa kontrol yang cukup memadai dari pemerintah (*government*) sangat berpotensi membukakan konflik horisontal antar-kelompok masyarakat (komunitas), *civil society vis-à-vis private sector*, maupun pemerintah dengan sektor swasta.

Nampaknya, dalam sirkumstansi politik (lokal maupun internasional), posisi ketiganya memang selalu berseberangan secara diametral (*vis-à-vis*). Bahkan hingga kini, perbedaan antara ketiga sektor tersebut bertendensi

---

<sup>9</sup> Lihat P. H. Gleick, *Freshwater and Foreign Policy: New Challenges*, Oakland, 2005. Hlm. 97.



semakin menguat—terutama perbedaan antara masyarakat sipil dengan pemerintah dan masyarakat sipil dengan sektor swasta. Agenda privatisasi dan liberalisasi dalam jejaring neoliberalisme<sup>10</sup> yang dikendalikan sektor swasta seringkali membuat peran pemerintah menjadi lemah bahkan kabur (*bias*) dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat sipil tadi. Di sini, seringkali masyarakat sipil berseberangan dengan pemerintah, dan di bawah kendali liberalisasi ekonomi, sektor swasta dengan leluasa mengendalikan pemerintah.<sup>11</sup>

Dalam soal krisis air dan perebutan sumbernya, pertarungan antara pemerintah/negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta membentangkan babak baru yang cukup serius dan menarik untuk dikaji lebih dalam; untuk itulah skripsi ini dituliskan. Sebagaimana ditandaskan Vandhana Shiva dalam bukunya, *Water Wars*, yang menyatakan bahwa ada tiga alasan penting mengapa air akan menjadi sumber konflik antarnegara di masa datang, yakni: (1) saat ini air telah diubah menjadi peluang pasar (*market opportunity*) oleh kekuatan neoliberalisme, sehingga air menjadi komoditas bisnis yang harus dipertukarkan dengan uang, sebab, (2) pasar air dunia diperkirakan melebihi angka 1 triliun dollar AS, dan (3) terjadi pergeseran kontrol atas air dari komunitas ke negara dan dari negara ke korporasi. Dampak terburuk dari poin

<sup>10</sup> Sebuah konsep dalam ekonomi politik internasional di mana peran negara berusaha dirduksi dan restriksi negara terhadap kepentingan publik disunat untuk kepentingan pasar. Dalam studi mengenai hal ini, peran institusi ekonomi internasional dan korporasi besar juga turut mengintervensi negara dalam sejumlah kebijakan ekonomi. Hal ini akan dijelaskan lebih jauh dalam pembahasan mengenai teori.

<sup>11</sup> Lihat Helmut Anheier, Mariles Glasius, dan Mary Kaldor, *Introducing Global Civil Society*, dalam Helmut Anheier, Mariles Glasius, dan Mary Kaldor (eds.), *Global Civil Society*, Oxford: Oxford University Press, 2001. Hlm. 5

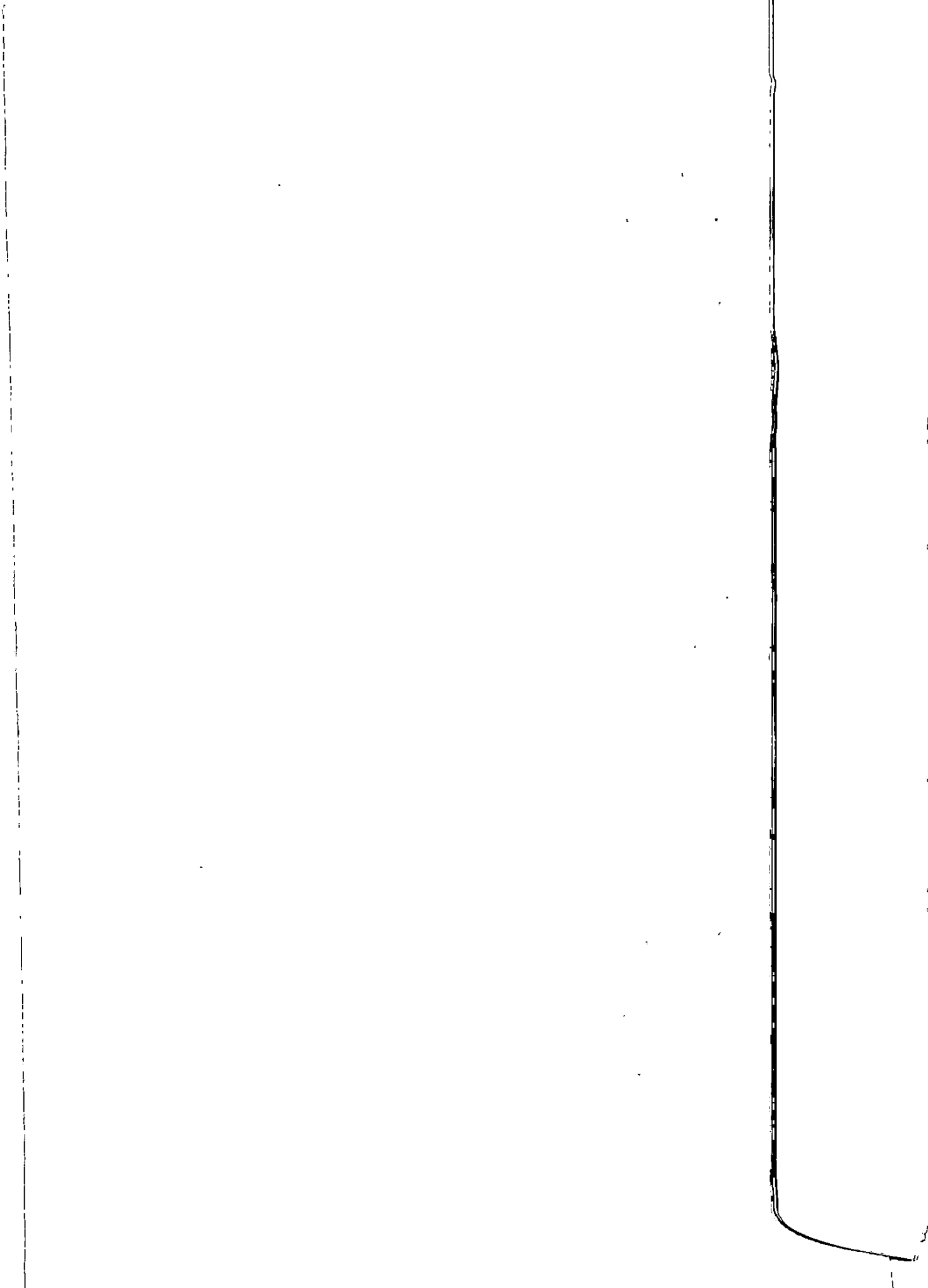
terakhir adalah konflik antarkomunitas yang kelak akan berujung pada konflik antarnegara dan peperangan besar dunia.<sup>12</sup>

Masalah yang melingkupi krisis air global sebagai dampak dari privatisasi dan liberalisasi sektor air belum sepenuhnya terjelaskan. Masalah krisis air baru sebatas dibahas sebagai, misalnya hak asasi manusia yang tercerabut—seperti dibahas Maude Barlow dan Tony Clarke<sup>13</sup>—atau problem mendasar kemanusiaan yang mengancam potensi konflik. Di luar semua itu, hegemoni sumber air oleh sektor-sektor swasta atas nama pencapaian keuntungan ekonomi, belum dibahas dan dikaji secara serius dan mendalam.

Untuk itulah, skripsi ini akan membahas politik air dalam jejaring neoliberalisme tadi. Skripsi ini akan memperlihatkan bagaimana air dikomodifikasi oleh sektor swasta di bawah jejaring neoliberalisme, untuk kemudian membatasi akses masyarakat sipil terhadapnya. Sejatinya, dari sinilah masalah bermula: politik air (mencakup pengelolaan dan pendistribusiannya) yang tidak jelas dari sebuah pemerintahan (*government*), membuat sumber air secara leluasa dikuasai atau diambil alih (*take over*) oleh sektor swasta. Dalam kuasa modal air kemudian menjadi *market opportunity* yang membatasi akses masyarakat sipil terhadapnya. Hanya yang memiliki uang yang bisa menikmati air bersih, sementara mereka yang tak mampu “membeli” air sama sekali tak bisa menikmatinya.

---

<sup>12</sup> Lihat Vandhana Shiva, *Water Wars*, Yogyakarta, Insist dan Walhi, 2003.



Secara umum, fenomena ini sudah terlihat di Pakistan. Sumber air minum masyarakat Pakistan sudah hampir sepenuhnya dikuasai oleh Nestlé dengan jargon "Pure Life"-nya. Meskipun dalam berbagai brosurnya Nestlé selalu mengatakan berkomitmen pada pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dunia, pada kenyataannya penguasaan Nestlé atas sumber air minum masyarakat Pakistan telah membuat masyarakat Pakistan kesulitan dalam mengakses air bersih untuk diminum. Nestlé telah melakukan komodifikasi air minum dengan memproduksi air kemasan botol (*bottled water*) yang harus "dibeli".

Dengan sangat investigatif Nils Roseman dari Swiss Coalition of Development Organisation, melalui program yang mereka namakan ActionAid Pakistan, menuliskan laporannya tentang hal tersebut dalam sebuah laporan berjudul *Drinking Water Crisis in Pakistan and The Issue of Bottled Water: The Case of Nestlé's 'Pure Life'*. Pada bagian pendahuluan, Roseman menulis:

"Access to an improved drinking water supply is not only a basic need and precondition for a healthy life; it is also a human right. 'Improved' water supply technologies include: household connection, public standpipe, borehole, protected dug well, protected spring, and rainwater collection. "Not improved" include unprotected well, unprotected spring, vendor-provided water, bottled water, and tanker truck-provided water. Access to an "improved source" also entails that the source is able to provide at least 20 litres per capita per day at a distance no more than 1000 metres from the user's residence.<sup>14</sup>"

<sup>14</sup> Untuk definisi bisa dilihat pada, *World Health Organization and United Nations Children's Fund: Water Supply and Sanitation Collaborative Council, pad.: Global Water Supply and Sanitation Assessment (Report)*, New York, Geneva, 2000, hlm. 77.

Di Indonesia, hal semacam itu terjadi dengan pengambilalihan kontrol atas air—yang selama ini ditangan perusahaan BUMN PAM Jaya, ke tangan korporasi-korporasi asing seperti Thames, Vivendi, dan Danone. Skripsi ini, secara mendalam akan menelusuri proses “pemindahan kekuasaan” atau hegemoni yang dilakukan neoliberalisme terhadap sumber-sumber air yang semula milik publik dan dikendalikan negara, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

### **C. Pokok Permasalahan**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil sebuah pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian skripsi ini, yakni: **Bagaimana Neoliberalisme memainkan perannya dalam politik air dunia—terutama di negara-negara berkembang?**

### **D. Kerangka Teori**

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, di antaranya:

#### **D.1. Teori Hegemoni**

Teori pertama yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah teori Hegemoni Gramsci

Hegemoni sebagai sebuah tindakan politik dan kebudayaan, menurut Gramsci, bisa dilakukan siapa saja dalam kondisi apa saja dan untuk kepentingan apa saja. Teori hegemoni ini cocok untuk menganalisis proses pencapaian “kepentingan” neoliberalisme atas sumber-sumber daya alam, termasuk sumber daya air.

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hegeishtai*. Istilah tersebut berarti yang berarti memimpin, kepemimpinan, atau kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Konsep hegemoni menjadi populer setelah dimaklumkan secara teoretis dalam pemikiran Antonio Gramsci yang dipahami sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu.

Menurut Gramsci hegemoni adalah:

“Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.”

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas di bawahnya. Hingga kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis

dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial kedalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa .

Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan mereayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk mereayasa kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni.”

John Storey menjelaskan konsep hegemoni untuk mengacu kepada proses sebagai berikut:

“...sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur *kekuasaan yang ada*.”

Dalam bukunya *Prison Notebooks*, Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya ekuivalen dengan ideologi, seperti kebudayaan, filsafat,

'reformasi moral dan intelektual' ketika Gramsci membicarakan transformasi kesadaran sebagai prasyarat perbaikan menuju sosialisme.<sup>15</sup>

Konsep penting yang dibicarakan Gramsci adalah ideologi dan hegemoni. Ideologi pada perkembangannya menjadi *core* kajian milik Althusser<sup>16</sup>, sedangkan Gramsci dikenal dengan pemikirannya tentang hegemoni. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni beranggapan bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yakni kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan "dominasi", sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim<sup>17</sup>, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya.

Bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk politik,

---

<sup>15</sup> Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. Hlm. 85.

<sup>16</sup> Lihat Louis Althusser, *Tentang Ideologi*, Yogyakarta, Jalasutra, 2006.

<sup>17</sup> Althusser juga pernah mengajukan konsep *State Apparatus* (SA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA). Keduanya merupakan konsep penting yang berguna dalam kajian budaya. *State Apparatus* (SA) atau Aparatus Negara (AN), bisa terdiri dari polisi, pengadilan, penjara, dsb. Sedangkan *Ideological State Apparatus* (ISA) atau Aparatus Ideologis Negara (AIN), terdiri dari beberapa institusi yang terspesialisasi seperti: Aparatus Ideologi Negara lewat institusi religius (menunjuk pada sistem masjid atau gereja yang berbeda-beda), Aparatus Ideologis Negara lewat institusi edukatif (menunjuk pada sistem sekolah umum dan swasta yang berbeda-beda), Aparatus Ideologis Negara lewat institusi keluarga, Aparatus Ideologi Negara lewat institusi hukum, Aparatus Ideologis Negara lewat institusi politis (menunjuk pada sistem politik, termasuk partai yang berbeda-beda), Aparatus Ideologi Negara lewat institusi perdagangan, Aparatus Ideologi Negara lewat institusi komunikasi (misalnya pers, radio, TV, dsb), Aparatus Ideologi Negara lewat institusi kebudayaan (misalnya sastra, alihraga, seni, dsb). Lihat Louis Althusser, *Op. Cit.*



kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.<sup>18</sup>

Adapun hubungan dua jenis kepemimpinan menurut Gramsci, kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*) itu menyiratkan tiga hal. *Pertama*, dominasi dijadikan atas seluruh musuh, dan hegemoni dilakukan kepada segenap sekutu-sekutunya. *Kedua*, hegemoni adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatus negara atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. *Ketiga*, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi kelas ini, baik pengarahannya maupun dominasi, terus berlanjut. Dengan demikian, konsep hegemoni yang dikembangkan Gramsci berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya “intelektual dan moral”.

Kepemimpinan ini terjadi karena adanya kesetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah (masyarakat) terhadap kelas atas (elit) yang memimpin. Persetujuan kelas bawah ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi kelompoknya. Internalisasi ideologis ini dilakukan dengan membangun sistem dan lembaga-lembaga, seperti negara, *common sense*, kebudayaan, organisasi, pendidikan, dan seterusnya, yang dapat memperkokoh hegemoni tersebut. Di sisi lain, hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya berjalan mulus, hambatan, dan rintangan bisa saja datang, terutama dari kelas-kelas yang tidak menerima hegemoni tersebut.

---

<sup>18</sup> Lihat A Pozzolini, *Pijar-pijar Pemikiran Gramsci*, Yogyakarta, Resist Book, 2006.

Yang dilakukan untuk menangani ketidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan dominasi yang represif melalui aparatus negara, misalnya polisi dan lainnya. Dua kepemimpinan, dominasi dan hegemoni menjadi hal penting dalam teori hegemoni Gramscian.

Teori hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci ini akan dipakai untuk melihat upaya sektor swasta (*private sector*) melakukan dominasi dan hegemoni atas hak-hak masyarakat atau komunitas di negara-negara berkembang. Bagaimana "ideologi" neoliberalisme berhasil disusupkan kaki-tangan intelektual mereka untuk lantas menghegemoni hak dan mengontrol akses masyarakat sipil terhadap sumber daya air.

Gramsci membedakan dua jenis intelektual yang menjadi kaki tangan neoliberalisme, yakni "intelektual tradisional" dan "intelektual organik". Intelektual tradisional adalah figur-figur akademikus atau orang-orang yang lahir dari produk universitas, seperti dosen, ilmuwan, atau akademisi lainnya, termasuk mahasiswa.

Sementara, intelektual organik, menurut Gramsci, merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai kelas. Karena itu, kelompok-kelompok, seperti buruh dan nelayan juga memiliki intelektual organik. Tak menutup kemungkinan, masuknya kelompok intelektual tradisional ke dalam klasifikasi ini. Melalui dua kelompok intelektual ini, menurut Gramsci, ideologi neoliberalisme disusupkan ke kelas bawah untuk melegitimasi tindakan hegemonik yang dilakukan oleh sektor swasta. Sehingga dengan legitimasi

ideologis dan akademis itu, mereka memiliki keleluasaan dalam melakukan tindakan-tindakan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara-negara berkembang.

Melalui pemikiran Marxist-Gramscian ini, kita bisa melihat bahwa melalui intelektual tradisional dan intelektual organik ini, Neoliberalisme mempoliferasi ide-ide dan gagasan tertentu. Dalam kasus politik air, intelektual tradisional dan intelektual organik neoliberalisme berusaha membangun ide/gagasan di tengah-tengah masyarakat bahwa air merupakan “kebutuhan” (*needs*) dan bukan “hak” (*right*) dan karenanya boleh dimiliki dan dijual. Lewat upaya poliferasi dan pembangunan ide/gagasan di tengah masyarakat inilah neoliberalisme melakukan upaya hegemoni.

Setelah melakukan poliferasi dan pengokohan wacana/ide/gagasan di tengah-tengah masyarakat, para intelektual organik kemudian melakukan apa yang disebut sebagai “war of position” (perang posisi). Yakni upaya sejumlah intelektual organik dalam memasuki sektor-sektor penting dalam birokrasi negara atau sendi-sendi sosial lainnya. Dalam hubungannya dengan pemikiran Louis Althusser, “war of position” ini dilakukan dengan cara mensubstitusi peran-peran strategis aparatus negara.

Peran “war of position” ini sangat penting dalam upaya hegemoni yang dilakukan neoliberalisme terhadap negara dan masyarakat sipil—terutama dalam relasinya dengan pembentukan dan penguatan opini publik yang akan

menjadi legalisasi sejumlah tindakan lanjutan yang dilakukan neoliberalisme terhadap negara dan masyarakat.

Opini publik dalam proses hegemoni, menurut Gramsci, menempati posisi sentral, baik dalam memenangkan "hegemoni" maupun "kontra-hegemoni" (*counter-hegemony*). Opini publik dapat melegitimasi sekaligus mendelegitimasi kekuasaan negara (*political society*). Artinya opini publik menghubungkan dua ruang/ranah secara resiprokal dan saling memengaruhi. Sebab, bentuk ideologis, kultural, moral/intelektual dari negara dan masyarakat adalah adalah opini publik. Proses formasi opini publik dalam masyarakat borjuis dan kapitalis (seperti ditunjukkan Neolib) berlangsung dalam penguasaan wacana melalui kepemilikan media massa. Partai politik dan parlemen adalah institusi yang mengandaikan politik massa dan opini massa. Kedua institusi ini mengorganisasi dan memobilisasi opini dari dalam dan dari luar institusi negara.

Jika opini publik adalah irisan atau interseksi dua ranah, negara dan masyarakat sipil, ini berarti tepatlah relasi tegangan *consent* dan *force*, *violence* dan *persuasion*, *power* dan *reason*, yang terejawantahkan dalam produk hukum dan kebijakan. Konflik inilah yang dimaksudkan Gramsci sebagai "war of position", yang berlangsung lama dalam kubu dan benteng pertahanan, dan akhirnya diskursus dan konflik yang terjadi memproduksi isi dari sebuah negara. Kesejajaran ini menghasilkan rumusan bahwa konflik

tentang opini publik dalam *civil society* secara simultan adalah konflik untuk meraih dan memelihara kekuasaan negara.<sup>19</sup>

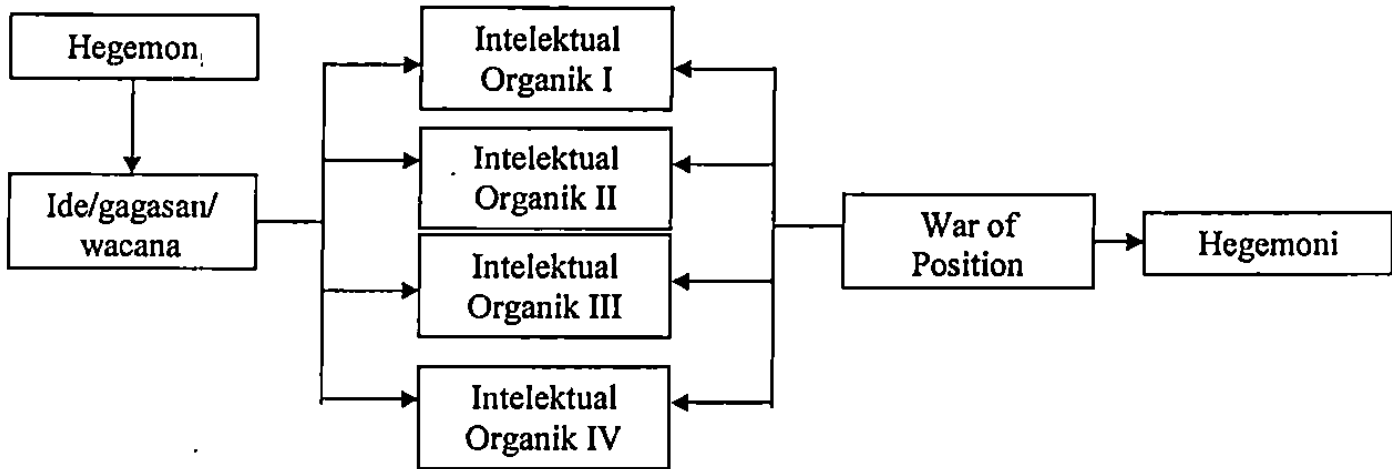
Singkatnya, “war of position” ini adalah upaya intelektual-intelektual organik tadi dalam rangka melegitimasi atau mendeligitimasi sejumlah opini publik yang berkembang atau dikembangkan di tengah masyarakat demi kepentingan Neoliberalisme. Lawan dari “war of position ini” adalah “war of manouvre”. Dalam tiap perjuangan politik selalu dibutuhkan sokongan militer dalam “war of manoeuvre” (perang manuver)—serangan frontal yang ditandai dengan pengerahan pasukan secara massif dan sporadis. Sebaliknya, “war of position” (perang posisi)—sebagaimana saya jelaskan di atas—ditandai tidak dengan pergerakan pasukan melainkan opini publik. Bila “war of manouvre” dilakukan di ranah nyata, seringkali “war of position” dilakukan di ranah pemikiran.

Maka, bila kaum neoliberalisme berhasil memenangkan “war of position” ini, maka upaya hegemoni akan berhasil dilakukan, dan “kepentingan” seperti yang diinginkannya akan segera tercapai. Teori ini akan dipakai untuk menjelaskan proses berpindahya kontrol atas akses terhadap sumber daya air dari masyarakat sipil ke negara kemudian ke sektor swasta yang menjadi kaki-tangan Neoliberalisme. Melalui teori ini, hegemoni akan dijelaskan sebagai sebuah rangkaian proses sejak politisasi air hingga privatisasi dan eksploitasi air.

---

<sup>19</sup> Lihat *Justinus Prastowo, Pemikiran Gramsci tentang Negara dan Civil Society*, diunduh dari <http://indonesiaprogress.blogspot.com/2009/07/pemikiran-gramsci-tentang-negara-dan.html>, pada 20

Dalam kasus politik air ini, upaya hegemoni yang dilakukan oleh neoliberalisme dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini:



## D.2. Neoliberalisme

Hegemoni pada tataran praksis dilakukan dengan berbagai modus dan pendekatan, skripsi ini akan memaparkan sejumlah modus dan pendekatan yang khas (*indigenous*) yang dipakai oleh neoliberalisme. Upaya hegemoni dalam bentuk-bentuk yang khas yang dilakukan Neoliberalisme yang saya maksud hanya bisa dipahami setelah kita mengenal apa itu neoliberalisme.

Menurut Ensiklopedia Bebas *Wikipedia*, neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberalisme mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politik menggunakan tekanan ekonomi

diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.<sup>20</sup>

Sepanjang tahun 1950, 1960, dan 1970an dunia hubungan internasional didominasi oleh sektor-sektor perdagangan dan investasi, perjalanan dan komunikasi, dan isu-isu yang lazim di dalam hubungan di antara negara-negara demokrasi liberal Barat. Hubungan itu menyediakan dasar bagi upaya baru oleh kaum liberal untuk memformulasikan suatu alternatif bagi kaum realis yang berniat menghindari ekseseks utopianisme atau liberalisme yang mendahuluinya.

Kaum liberal yang berusaha melahirkan alternatif-alternatif untuk menghindari ekseseks utopianisme tersebut—meminjam istilah Robert Jackson dan Georg Sorensen—kemudian melahirkan sebuah aliran ekonomi politik

---

<sup>20</sup> Lihat *Neoliberalisme*, diunduh dari [id.wikipedia.org/wiki/neoliberalisme.html](http://id.wikipedia.org/wiki/neoliberalisme.html) pada tanggal 2 Januari 2009. Pukul 19.00.

baru yang disebut sebagai neoliberalisme.<sup>21</sup> Menurut ensiklopedia bebas *Wikipedia*, neoliberalisme merupakan teori yang berusaha memperbaiki liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional. Teori ini berpendapat bahwa aktor-aktor bukan hanya negara (*government*), tetapi juga organisasi-organisasi nonpemerintah (*non-governmental organization*).

Para pendukung teori ini seperti Maria Chatta berargumen bahwa, negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaiannya bersifat relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian yang bersifat mutlak. Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional menunjukkan berarti bahwa neoliberalisme juga bisa disebut sebagai institusionalisme liberal.<sup>22</sup>

Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang menghalangi hak suatu bangsa atas kedaulatannya. Neoliberalisme juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi (peran—campur tangan) pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain.

---

<sup>21</sup> Lihat Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

<sup>22</sup> *Ibid.*





Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudah Perang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baru teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan juga Joseph Nye.<sup>23</sup>

Sebenarnya, jika kita merujuk pada literatur-literatur mengenai (perkembangan) politik ekonomi, kita akan melihat bahwa ada dua jenis aliran neoliberalisme. *Pertama*, aliran Ordo Neoliberalisme yang digagas dan dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik dari Mazhab Freiburg di Jerman akhir tahun 20-an. Pemikiran neoliberalisme yang dikembangkan pakar-pakar ekonomi Freiburg ini sudah berusaha mengakomodasi kritik-kritik yang dilancarkan kalangan sosialis maupun Marxis. *Kedua*, aliran neoliberalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh liberal yang tergabung dalam The Mont Perelin Society (MPS). Aliran ini pada intinya tidak menyukai adanya campur tangan negara dalam sirkumstansi ekonomi global. Aliran inilah yang kelak kita ketahui menjadikan dinamika pasar sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan (ekonomi).<sup>24</sup>

Mazhab Freiburg digawangi oleh sejumlah tokoh ekonomi liberal terkemuka seperti Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Franz Bohm, Alexander Rustow, Alfred Muller-Almack, dan lainnya. Neoliberalisme Mazhab Freiburg sebenarnya tidak terlalu berkembang, pemikiran ini merupakan

---

<sup>23</sup> Lihat *Neoliberalisme dalam Hubungan Internasional*, diunduh dari [http://en.wikipedia.org/wiki/hubungan\\_internasional.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/hubungan_internasional.htm) diakses pada tanggal 21 September 2008, pukul 16.50 WIB.

<sup>24</sup> Lihat Delipray, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006, Hlm. 162

pengembangan dari teori politik ekonomi liberal yang berkembang abad ke-18 dan 19 (liberalisme klasik). Maka, aliran ini juga dikenal sebagai Ordo Liberal atau Neo Liberal. Penambahan kata “Neo” yang dinisbatkan bagi mazhab ini sebenarnya semata-mata hanya merujuk pada pembaharuan paradigma yang dilakukan kelompok ini dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi liberal klasik.

Di antaranya, Mazhab Freiburg berusaha mengakomodasi kritik-kritik yang selama ini dilancarkan kaum Marxis dan Sosialis terhadap ekonomi liberal klasik. Melalui jurnal mereka yang berjudul *Ordo: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft un Gessellschaft* mereka mengusung pemikiran yang disebut sebagai “ekonomi pasar sosialis” (*Soziale Marktwirtschaft*) atau “*social market economy*”, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas, namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuatan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem, ekonomi pasar sosialis sudah berusaha memerangi kekuasaan kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter.

Pada intinya, pemikiran neoliberalisme dalam konsep Mazhab Freiburg ini adalah bagaimana membuat perimbangan antara kebebasan dan keadilan sosial, serta harmonisasi anatara individu dan masyarakat.<sup>25</sup>

Namun, neoliberalisme yang dimaksud dalam skripsi ini adalah neoliberalisme iniis kedua yang dicetuskan oleh *The Mont Pelerin*

*Society* yang diagung-agungkan sejumlah tokoh seperti F. A. Hayek, Milton Friedman, Gary S. Becker, dan George Stigler. Neoliberalisme yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam skripsi ini adalah sebuah “isme” dengan misi-misi khusus, yakni mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk digantikan oleh mekanisme pasar.

Artinya, pasar menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Implikasinya, masyarakat dan negara hanya instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota prtikelir dalam masyarakat. Akhirnya, peran negara benar-benar harus surut dan digantikan oleh sektor swasta (*private sector*). Akhirnya, “pasar”, “deregulasi”, “debirokratisasi”, “privatisasi”, dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi” adalah sejumlah kata kunci penting dalam “tata-laksana” prinsip ekonomi neoliberalisme.

Paham neoliberalisme “jenis” kedua inilah yang pada gilirannya menjadi kiblat baru perekonomian global dewasa ini, seperti diungkapkan Amien Rais:

“Secara singkat dapat dikatakan pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru atau katakanlah didasarkan pada neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Salah satu doktrin globalisasi adalah mendorong negara-negara di muka bumi untuk mengintegrasikan ekonomi mereka kedalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin itu meliputi: liberalisasi perdagangan dan arus keuangan; deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja; dan merampingkan (*downsizing*) peran negara, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan sosial dan ekonomi.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendapat Bangsa: Selamatnya Indonesia, Selamatnya*

Neoliberalisme yang kini menjadi kiblat perekonomian global diperkuat oleh legitimasi “Washington Consensus” dan campur tangan institusi-institusi internasional seperti *World Bank* (WB), *International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO), dan lainnya. Dengan dua cakar raksasa yang memiliki kekuatan/kekuasaan (*power*) untuk mengendalikan seluruh negara di muka bumi tersebut neoliberalisme semakin tak terbendung menjadi paradigma politik ekonomi global. Terutama Konsensus Washington (*Washington Consensus*) yang ditawarkan ekonom John Williamson pada 1990-an.

Washington Konsensus bermula ketika negara-negara Amerika Latin—terutama tiga negara paling berpengaruh, yakni Meksiko, Brasil, dan Argentina—bangkrut pada pertengahan 1980-an dan paruh pertama 1990-an. IMF, Bank Dunia, dan para ekonom Amerika Serikat yang bermarkas di Washington kemudian “meracik” resep obat generik untuk mengatasi kebangkrutan ekonomi yang dialami negara-negara Amerika Latin tersebut.

Oleh ekonom John Williamson, resep generik ini diberi nama Konsensus Washington (*Washington Consensus*). Konsensus ini lahir dari pemikiran para ekonom beraliran liberal dan konservatif. Semula, konsensus ini hanya ditujukan untuk kasus Amerika Latin, namun dalam perkembangannya kemudian konsensus ini dianggap “bisa” diaplikasikan di negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia.

Konsensus ini terdiri dari 10 poin, yang bisa dirangkum menjadi tiga pilar, yakni (1) disiplin anggaran pemerintah (*fiscal austerity atau fiscal discipline*), (2) liberalisasi pasar (*market liberalization*), dan (3) privatisasi BUMN.<sup>27</sup>

Secara singkat, isi Konsensus Washington—yang sering juga disebut sebagai pendekatan Neoliberal—adalah, *pertama*, disiplin fiskal. Pemerintah diminta menjaga agar anggarannya mengalami surplus. Kalaupun terpaksa defisit, tidak boleh melampaui dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB). *Kedua*, memberikan prioritas kepada belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya memperbaiki distribusi pendapatan.

*Ketiga*, memperluas basis pemungutan pajak agar dapat dibangun struktur penerimaan anggaran yang sehat. *Keempat*, liberalisasi finansial. Suku bunga harus dijaga positif secara riil (lebih tinggi daripada laju inflasi) dan hindari kebijakan suku bunga yang mengistimewakan debitor tertentu (*preferential interest rates for favored borrowers*). *Kelima*, kurs mata uang harus diusahakan kompetitif (tidak terlalu kuat), tetapi kredibel (tidak terlalu lemah).

*Keenam*, mendorong liberalisasi perdagangan melalui upaya menghapus restriksi kuantitatif (hambatan perdagangan, seperti pengenaan tarif, kuota, dan larangan-larangan lainnya). *Ketujuh*, menerapkan kesamaan

---

<sup>27</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London: Penguin, 2005.

perlakuan antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing langsung.

*Kedelapan*, untuk mendorong kinerja badan usaha milik negara (BUMN), seyogianya dilakukan privatisasi (penjualan saham ke sektor privat). *Kesembilan*, pasar harus didorong agar lebih kompetitif melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan menghilangkan hambatan atau restriksi bagi para pelaku ekonomi baru. Dan, *keseperuluh*, harus ada perlindungan terhadap *property rights*, baik di sektor formal maupun sektor informal.<sup>28</sup>

Konsensus Washington inilah yang menjadi senjata utama pelaku ekonomi neoliberal—perusahaan-perusahaan Multi Nasional—dalam memulusakan proses privatisasi BUMN dan sumber daya alam di sejumlah negara berkembang, tentunya dengan dukungan secara penuh dari Bank Dunia dan IMF. Pengambilalihan melalui privatisasi ini secara dramatis mengakibatkan harga bagi penduduk lokal dan perusahaan-perusahaan ini mengeruk keuntungan terutama dari negara-negara dunia ketiga.<sup>29</sup>

### **D.3. Komodifikasi dan Privatisasi**

Komodifikasi dan Privatisasi, dua modus dan pendekatan inilah yang dipakai neoliberalisme dalam menghegemoni sumber daya air di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

---

<sup>28</sup> Lihat A Tony Prasetyo, *Menggugat Konsensus Washington*, dari Harian Kompas, 25 September 2006. Melalui dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/25/opini/2978827.htm>, diunduh pada 6 Desember 2008 pukul 08.05 WIB.

<sup>29</sup> Lihat Manda Barlow dan Tony Clarke, *Op. Cit.* hlm. xiii

Sebelum membahas komodifikasi dan privatisasi, terlebih dahulu kita akan melihat hubungan antara neoliberalisme dengan kapitalisme. Prinsip penting yang menghubungkan kedua "isme" tersebut sebenarnya adalah prinsip akumulasi modal. Menurut Deliarov, kapitalisme juga menjadi spirit utama dari aliran neoliberalisme.<sup>30</sup>

Kapitalisme adalah sebuah sistem yang memproduksi komoditas-komoditas, dan secara natural penciptaan komoditas adalah inti dari praktek ideologi kapitalisme. Kita memahami keinginan-keinginan dalam kerangka komoditas-komoditas yang diproduksi berkaitan dengannya. Kita juga belajar untuk memikirkan masalah-masalah kita dalam kerangka komoditas-komoditas yang dikonstruksikan dapat memecahkan masalah kita.

Jadi, masalah kematangan dan kedewasaan bagi perempuan misalnya, telah dikerangkakan dalam term rok kerja, buku masakan, potongan rambut, kosmetik, dan seterusnya; masalah efektivitas dan produktivitas juga telah dikerangkakan ke dalam term *hand/mobile phone*, *laptop*, kartu kredit, dan lain sebagainya. Di koran-koran kita juga melihat bagaimana kesadaran keluarga akan lingkungan telah dikerangkakan ke dalam konsumsi atas rumah-rumah mewah di pinggiran kota atau di daerah pengunungan, yang berhalaman luas, dipenuhi tanaman, dan seterusnya. Sesungguhnya mereka bukanlah keluarga yang sadar lingkungan, tetapi keluarga yang konsumtif dan terkomodifikasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat Deliarov, *Op. Cit.* Hlm. 166

<sup>31</sup> Lihat Antariksa, *Komodifikasi/Inkorporasi*, KUNCI Newsletter, melalui

Komodifikasi menurut Yasraf Amir Piliang (2004), terambil dari kata komoditas atau komoditi (*commodity*), yakni segala sesuatu yang diproduksi dan dipertukarkan dengan sesuatu yang lain, biasanya uang, dalam rangka memperoleh nilai lebih atau keuntungan. Maka, Yasraf mendefinisikan komodifikasi (*commodification*) sebagai, sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi, sehingga kini menjadi komoditi.<sup>32</sup>

Misalnya air, seperti akan dibahas dalam skripsi ini. Sebelumnya air bukanlah merupakan komoditas, sebab air merupakan sumber daya alam yang bisa diakses siapa saja tanpa batas. Bahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akses atas air dimasukkan kedalam kategori Hak Asasi Manusia. Jadi, semua orang bisa mengakses air tanpa harus “membelinya”.

Namun, kapitalisme telah menjadikan air sebagai barang “yang diproduksi” melalui kemasan-kemasan tertentu. Di sini, air yang tadinya “bukan komoditas” berubah menjadi komoditas. Maka, pada gilirannya, air menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain dalam rangka akumulasi modal. Proses transformasi air menjadi komoditas itulah yang disebut sebagai komodifikasi.

Bahkan, komodifikasi bisa berlaku untuk sesuatu yang sifatnya lebih abstrak seperti citra (*image*) atau ikon (*icon*) tertentu. Penjelasan Antariksa mengenai komodifikasi Che Guevara dalam Newsletter Kunci berikut ini mungkin bisa membantu menjelaskan komodifikasi dalam wilayah ini:

---

<sup>32</sup> Lihat Yasraf Amir Piliang, *Demokrasi yang Dibenci: Tantangan Melampai Batas-batas Kebudayaan*



“Sekarang para pemegang otoritas ekonomi dan budaya mengolah citra Che menjadi ikon yang bisa diperdagangkan secara internasional. Citra *leftist* Che kini diartikulasikan sebagai kegagahan dan ketrendian, Che diolah menjadi ikon subversif yang digemari anak muda. Pendeknya, Che bisa dipakai untuk menjual apapun, mulai musik, bir, stiker, dan jam, hingga foto, buku, film, dan materi kuliah. Che yang sekarang telah dikemas dalam versi butik.”<sup>33</sup>

Konsep berikutnya yang tidak kalah penting adalah privatisasi. Bisa dikatakan privatisasi biasanya menjadi kemasam atau selubung besar dari komodifikasi yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Secara awam privatisasi bisa dipahami sebagai pengambilalihan aset-aset negara (BUMN) oleh sektor swasta. Wilayah atau sektor yang tadinya milik masyarakat luas (publik) kemudian ditarik menjadi milik perseorangan atau kelompok tertentu (*private*).

Menurut Deliarnov, sebenarnya privatisasi adalah konsep yang netral. Netral dalam pengertian bisa berefek positif maupun negatif, bisa mendatangkan keuntungan tetapi bisa juga menimbulkan kerugian. Pada tahap awal, privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN yang “hidup segan mati tak mau”. Akan tetapi, privatisasi pada gilirannya bisa membawa kerugian besar jika sudah berada di tangan sektor swasta (*private sector*) yang sudah tidak lagi memperdulikan kepentingan publik.

Teori dan konsep-konsep di atas akan dipakai untuk melihat upaya hegemoni neoliberalisme—melalui korporasi—terhadap sumber daya air di negara berkembang sebagai upaya yang sifatnya prosesual. Hegemoni dilakukan

---

<sup>33</sup> Lihat Antariksa, *Ibid.*

neoliberalisme dengan upaya menggiring paradigma dan opini publik ke arah liberalisasi sektor air—upaya ini dilakukan oleh intelektual-intelektual organik dan tradisional neolib dalam “war of position” yang mereka perankan di hampir seluruh ranah (*field*) publik. Dalam tataran praktis, hegemoni dilakukan dengan upaya komodifikasi, privatisasi, dan eksploitasi sumber air itu sendiri.

#### E. Hipotesis

Bagaimana neoliberalisme memainkan perannya dalam politik air dunia dan membukakan konflik langsung antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta?

1. Neoliberalisme melakukan upaya hegemoni dengan cara menyebarkan ide-ide/gagasan-gagasan/wacana-wacana baru untuk dibentuk menjadi opini publik yang bisa melegitimasi dan mendelegitimasi perihal tertentu—dalam hal ini liberalisasi air—sesuai dengan agende kepentingan mereka melalui intelektual tradisional dan intelektual organik yang mereka sebarakan ke berbagai sendi kehidupan sosial di negara berkembang.
2. Para intelektual organik kemudian melakukan apa yang disebut sebagai “war of position” dengan cara memasuki sejumlah posisi stertegis dalam birokrasi pemerintahan atau sendi-sendi sosial lainnya. Mereka berambisi untuk menjadi aparat-aparat negara yang

memainkan peran pembentuk opini publik atau pengambil kebijakan strategis. Setelah mereka memenangkan “war of position”, hegemoni kemudian bisa dilakukan neoliberalisme atas sumber-sumber air tadi.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jejaring-jejaring dan kaki-tangan neoliberalisme melakukan peranannya dalam upaya hegemoni dan privatisasi sumber daya air di negara-negara berkembang. Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi ilmu hubungan internasional secara empiris dan akademis tentang privatisasi sumber daya alam dan hubungannya dengan konflik horisontal antara masyarakat sipil, pemerintah/negara, dan sektor swasta.

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai upaya intelektual yang penulis lakukan setelah menempuh masa studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik

agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi kajian pada kasus privatisasi sumber daya air yang terjadi di negara-negara berkembang. Kasus privatisasi sumber daya air di negara berkembang menjadi menarik untuk diteliti secara lebih mendalam sebab hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah di level negara berkembang masih sangat kuat. Masyarakat sipil masih menjadi “tanggungan” negara yang harus benar-benar dijamin kesejahteraan dan kelayakan hidupnya. Di saat bersamaan, pemerintahan di negara-negara berkembang juga merupakan pemerintahan yang rapuh dalam menghadapi tatanan ekonomi liberal. Sehingga tidak jarang mereka terjerat dalam skema politik manipulatif yang dimainkan kaum (neo)liberal untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pihaknya.

Di samping itu, kasus mengenai konflik horisontal antara masyarakat sipil, masyarakat sipil dan negara, maupun masyarakat sipil dan sektor swasta memang lebih sering terjadi di negara-negara berkembang (negara dunia ketiga). Sehingga penelitian ini akan membatasi sekup kajian hanya di negara-negara berkembang saja.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* (*deskriptif*). Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup>

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya dalam situasi-situasi tertentu. Model analisis yang dipakai adalah analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>35</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan) baik berupa buku, makalah ilmiah, artikel jurnal, koran maupun internet.

---

<sup>34</sup> Noh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 63.

<sup>35</sup> *Library Research: A Guide to the Study of Documents*, Jakarta, Pustaka Prima, 2003, Hal. 20

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Penelitian ini mengambil data-data sekunder baik dari buku, makalah ilmiah, artikel jurnal, koran maupun internet. Analisis dilakukan dengan metode analisis data (*content analysis*), agar bisa memberikan simpulan yang tepat dan beberapa saran untuk bisa dijadikan bahan rujukan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya yang lebih komperhensif. Pengambilan simpulan menggunakan metode induktif dan komparatif.

### H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, akan berisi latar belakang masalah yang menjadi inti kajian skripsi ini. Pada bab ini juga pertanyaan penelitian dimunculkan melalui rumusan masalah. Di samping itu, bab ini juga akan memaparkan kerangka teoretik (*theoretical framework*) yang akan dipakai sebagai pisau analisis persoalan yang hendak dikaji, teori-teori dan konsep yang akan dipakai antara lain: a) teori hegemoni (Antonio Gramsci), b) neoliberalisme, c) komodifikasi/inkorporasi dan privatisasi. Bab ini juga memaparkan hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**AIR DI PASAR AIR DUNIA**, bab ini akan mendeskripsikan fenomena krisis air global dan meningkatnya nilai tukar air di pasar dunia. Di samping itu, skripsi ini juga akan berupaya memaparkan praktik politik air di negara-negara berkembang dan konspirasi global untuk privatisasi air yang dilakukan oleh rezim negara tertentu dan aktor neoliberalisme lainnya.

**BAB III BERPINDAHNYA KONTROL AIR DAN TERBUKANYA KONFLIK AIR DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG**, bab ini akan menceritakan bagaimana kontrol atas air telah berpindah dari komunitas ke negara dan dari negara ke korporasi. Setelah kontrol dan akses itu berpindah, seperti akan dibahas dalam bab ini, konflik air mulai menjadi masalah serius di negara-negara berkembang.

**BAB IV PRIVATISASI DAN HEGEMONI AIR DALAM JERAT NEOLIBERALISME**, bab ini akan membahas hegemoni neoliberalisme dalam peta ekologi global—khususnya air—yang dilakukan melalui tiga tahapan; a) komodifikasi, b) privatisasi, dan c) eksploitasi. Bab ini juga akan memaparkan proses yang dilakukan neoliberalisme dalam melakukan hegemoni terhadap sumber daya air di negara berkembang.

**BAB IV KESIMPULAN**, bab ini merupakan kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai upaya analisis yang dilakukan sejak bab awal hingga bab